

SKRIPSI

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA



HOWARD BENYAMIN LIEMSELA

1610521009

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Howard Benyamin Liemsela

1610521009

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA

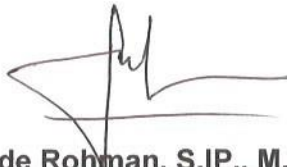
Disusun dan diajukan oleh

HOWARD BENYAMIN LIEMSELA
1610521009

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 19 September 2022

Pembimbing,



Dede Rohman, S.IP., M.Si.
NIDN: 0919057501

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**




Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

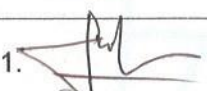
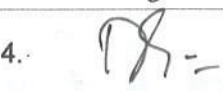
KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA

disusun dan diajukan oleh

HOWARD BENYAMIN LIEMSELA
1610521009

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **19 September 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
TIM PENGUJI

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Ketua	1. 
2.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Sekretaris	2. 
3.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Anggota	3. 
4.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar




Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Howard Benyamin Liemsela

NIM : 1610521009

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pas 70).

Makassar, 19 September 2022

Yang membuat pernyataan



Howard Benyamin Liemsela

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.H.Int) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dan juga hingga selesainya skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
2. Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar dan Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.
3. Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar dan penasihat akademik, pembimbing KKLP dan Skripsi Dede Rohman, S.IP., M.Si. penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala waktu yang diluangkan untuk penulis pada saat meminta saran dan masukan dalam penyusunan laporan KKLP.
4. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, PARADIGMA, penggemar nyam-nyam selaku seperjuangan dan teman hidup, serta teman-teman yafika squad, dan para staf sekretariat TGUPP, semoga segala kebaikan-kebaikan saudara(i) diterima sebagai ibadah oleh-Nya.

Makassar, 30 Agustus 2022

Howard Benyamin Liemsela

ABSTRAK

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA

Howard Benyamin Liemsela
Dede Rohman

Perikanan di Sulawesi Selatan mengalami produksi yang tidak stabil maka dari itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang dengan tujuan agar produksi perikanan khususnya ikan tuna di Sulawesi Selatan dapat di produksi secara lebih stabil atau semakin bertambah. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang sebagai salah satu bentuk kerjasama *sister province* dimana kerjasama antar daerah ini bertujuan untuk memberikan opsi dalam pengembangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dibangun berlandaskan dengan teori Paradiplomasi dan konsep *Sister Province*. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah Dalam kerjasama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dalam pengembangan beberapa bidang dimana salah satu yang paling diminati Jepang adalah kerjasama di bidang budidaya hasil laut yang mana jenis komoditas nya yaitu ikan tuna. Pemerintah Sulawesi Selatan dengan menggunakan jalur kerjasama *sister province* menemukan variable - variabel yang mendorong Sulawesi Selatan dalam menemukan strategi-strategi yang digunakan dalam pengembangan produksi ikan tuna. Namun dalam tahap pelaksanaan kerjasama ini terhambat akibat permasalahan internal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Sister Province*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Prefektur Ehime, Ikan tuna.

ABSTRACT

COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE AND EHIME PREFECTURE IN INCREASING TUNA FISH PRODUCTION

**Howard Benjamin Liemsela
Dede Rohman**

This research was conducted to explain how the cooperation between South Sulawesi Province and Japan's Ehime Prefecture is a form of sister province cooperation where this inter-regional cooperation aims to provide options for regional development. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that is built on the theory of Paradiplomacy and the concept of Sister Province based on the analyst's explanation given by Takdir Ali Mukti who assumes that Paradiplomacy refers to the behavior and capacity of conducting foreign relations with foreign parties carried out by sub-state entities, in the context of their specific interests. The concept of sister province cooperation is the solution taken by the South Sulawesi Provincial Government in cooperation with Japan's Ehime Prefecture. In this collaboration, the Provincial Government of South Sulawesi cooperates in the development of several fields where one of the most interested in Japan is cooperation in the field of marine product cultivation in which the type of commodity is tuna. The solution taken by the South Sulawesi government by using the sister province cooperation channel found variables that encourage South Sulawesi to find strategies used in developing tuna fish production.

Keywords: Sister Province, South Sulawesi Provincial Government, Ehime Prefecture, Tuna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Fokus Penelitian	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktisi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Konseptual Dan Teori.....	10
2.1.1 Paradiplomasi	10
2.1.2 Sister Province	16
BAB III METODE PENELITIAN	22

3.1	Rancangan Penelitian	22
3.2	Kehadiran Peneliti.....	23
3.3	Lokasi Penelitian.....	23
3.4	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.6	Teknik Analisa Data.....	24
3.7	Tahap-Tahap Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN		28
4.1	Strategi Pelaksanaan Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang Dalam Pengembangan Produksi Ikan Tuna	30
BAB V PENUTUP		44
5.1	Kesimpulan	44
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kunjungan Gubernur Ehime di Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
Gambar 4.2 Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> (LoI)	37
Gambar 4.3 Penandatanganan MoU Kerjasama Sister Province antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Produksi ikan tuna pada tahun 2017	32
Tabel 4.2 Produksi ikan tuna pada tahun 2018.....	33
Tabel 4.3 Produksi ikan tuna pada tahun 2019.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki banyak pulau dimana luas daratan hampir sama dengan luas perairan dan laut. Selain itu alam Indonesia memiliki iklim tropis, hutan hujan, persawahan, kawasan perairan, beragam buah, hingga binatang. Hal ini kemudian membuat Indonesia kaya akan SDA (Sumber Daya Alam). Namun di era globalisasi saat ini Indonesia perlu untuk mengembangkan cara pengelolaan SDA dalam menjamin keberlangsungan dan pemeliharaan ekosistem dengan baik, maka dibutuhkan suatu sistem teknologi yang efisien dan efektif dalam mewujudkan hal tersebut.

Kekayaan SDA Indonesia sangat melimpah salah satunya adalah sumber daya laut. Komoditas utama ekspor hasil laut Indonesia antara lain adalah udang, tuna dan jenis ikan pelagis lainnya, cumi-cumi/gurita, rajungan, ikan demersal, tilapia, dan rumput laut.¹ Hasil laut Indonesia telah diterima sekitar 158 negara di dunia dengan pasar utamanya yaitu AS, Cina, Jepang, Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam, Italia, dan Hong Kong.

Dalam era revolusi digital saat ini para pemangku kepentingan perlu untuk melakukan pengembangan dan inovasi terhadap produksi ikan tuna. Kerjasama kemajuan teknologi saat ini dibutuhkan untuk merubah pola hidup hingga peradaban masa depan umat manusia. Teknologi yang

¹Tim Redaksi LautSehatID, 'Hasil Laut Indonesia Yang Diekspor Ke Luar Negeri | LautSehat.ID', *Lautsehat.ID*, 2021 <<https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/hasil-laut-indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/>> [accessed 15 June 2022].

diciptakan manusia semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di era globalisasi saat ini teknologi sangat berperan penting dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, pendidikan, pertanian, peternakan dan masih banyak yang bidang lainnya.

Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Ikan tuna sebagai salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia, bukan hanya karena jumlahnya banyak di perairan Indonesia, tetapi juga karena nilai ekonominya yang tinggi, merupakan ekspor andalan Indonesia ke beberapa negara, seperti Jepang, Amerika dan Eropa. Ikan tuna sudah menjadi ikan yang banyak diekspor keluar negeri.

Melihat pada periode 2016-2020 hasil produksi ikan tuna di Indonesia mengalami penurunan pada 2019 dan 2020. Pada tahun 2018 produksi ikan tuna Indonesia mencapai 409.024,18 ton, namun pada tahun 2019 turun menjadi 319.325,00ton dan di tahun 2020 semakin menurun menjadi 69.650,00 ton. Adapun beberapa daerah penghasil ikan tuna terbesar di Indonesia pada tahun 2020 antara lain, Maluku Utara 8.773,00 ton, Gorontalo 10.175,00 ton, DKI Jakarta 7.969,00 ton, Sulawesi Utara 7.279,00 ton, Papua Barat 5.128,00 ton.²

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan perairan yang dihuni oleh berbagai jenis ikan ekonomis penting, bukan hanya untuk kebutuhan lokal tetapi juga untuk kebutuhan ekspor yang berkontribusi dalam peningkatan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu jenis ikan yang menjadi komoditas andalan Sulawesi

² 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/indicator/56/1516/1/nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html>> [accessed 17 June 2022].

Selatan adalah jenis ikan tuna yang hidup pada semua perairan Sulawesi Selatan, walau sentra-sentra produksinya hanya pada beberapa tempat.³ Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa spot daerah penghasil tuna antara lain, Basokeng, Turungan Beru di Bulukumba, Lappa di Sinjai, Bajoe di Bone, Bone Pute di Luwu, serta di Pare-Pare, Barru dan Suppa di Selat Makassar.

Hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh luas *fishing ground*. Luas *fishing ground* nelayan dibatasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Adanya peraturan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan yang mengikat nelayan untuk menangkap sesuai dengan tempat penerbitan surat kapal membuat para nelayan tidak dapat menangkap pada wilayah jalur migrasi tuna yang potensial.⁴ Dari segi wilayah, Kabupaten Sinjai memiliki daerah wilayah tangkap yang lebih luas, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Selain itu, jumlah tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kapasitas kapal nelayan. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim puncak. Saat musim puncak, jumlah tangkapan seringkali melebihi jumlah daya tampung kapal sehingga mereka harus pulang lebih awal untuk menjual dan menurunkan muatannya. Kondisi jumlah tangkapan ini dapat mempengaruhi durasi waktu yang dibutuhkan dalam penangkapan ikan.

Operasi penangkapan Ikan Tuna berkisar antara 5 – 12 hari tergantung dari jumlah hasil tangkapan dan kapasitas kapal. Saat musim puncak dimana jumlah Ikan Tuna melimpah, nelayan dapat membutuhkan waktu tangkap yang lebih singkat, hanya 5 hari. Saat musim puncak, biaya

³ Sudirman, Gagaring Pagalung, Justin, Andi Aswan, and Firman, 'Profil Perikanan Tuna Di Sulawesi Selatan', *Universitas Hasanuddin*, 2020

⁴ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan'.

operasional kapal untuk keperluan biaya es dan biaya bahan bakar juga cenderung menurun. Sebaliknya, waktu yang dibutuhkan untuk menangkap dapat mencapai 12 hari diluar musim penangkapan. Dengan durasi yang lama, biaya operasional yang dikeluarkan juga mengalami peningkatan. Hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak berada dalam posisi lima besar daerah penghasil ikan tuna di Indonesia, hasil produksi ikan tuna Sulawesi Selatan di tahun 2019 13.911,00-ton dan mengalami penurunan hasil produksi yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu 4.505,00 ton.⁵

Rata-rata volume tangkapan Ikan Tuna yang berbobot kurang lebih 20 kg oleh setiap kapal nelayan di sentra jalur migrasi tuna pada enam wilayah mencapai 0,341 ton per kapal per bulan. Volume produksi tangkapan yang terendah berasal dari wilayah Makassar. Rendahnya jumlah produksi per kapal akibat dari wilayah tangkapan yang jauh dari pulau terdekat, diperkirakan sekitar 6-7 mil dari wilayah Pulau Kapoposan.⁶ Jauhnya wilayah tangkap ini mempengaruhi jumlah nelayan yang melakukan penangkapan. Pada umumnya, nelayan penangkap berasal dari Pulau Pandangan yang merupakan bagian dari Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Dekatnya wilayah penjualan dari Kota Makassar membuat nelayan menjual langsung hasil tangkapan ke eksportir di Kota Makassar.

Dari fakta yang ada produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti Fishing Ground, kapasitas kapal, jauh nya wilayah yang mempengaruhi biaya operasional. Maka dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Selatan terkendala pada teknik dan strategi produksi ikan tuna, sehingga hasil dari produksi ikan di Sulawesi Selatan

⁵ 'Produksi Perikanan', *Statistik KKP*
<<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2#panel-footer>> [accessed 17 June 2022].

⁶ Sudirman, Gagaring Pagalung, Justin, Andi Aswan, and Firman, 'Profil Perikanan Tuna Di Sulawesi Selatan', *Universitas Hasanuddin*, 2020

tidak signifikan bahkan mengalami penurunan hasil tangkapan. Maka untuk meningkatkan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan mengambil langkah yaitu kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang dalam Beberapa bidang yang di dalamnya termasuk kerjasama dalam budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut.

Prefektur Ehime yang terletak di barat laut di kepulauan Shikoku Jepang memiliki ibu kota Matsuyama. Prefektur Ehime memiliki banyak industri, termasuk pembuatan kapal, kimia, penyulingan minyak, produk kertas dan tekstil. Selain itu Prefektur Ehime sebagian besar bertumpu pada industri pertanian dan perikanan, dan juga terkenal dengan jeruk dan budidaya mutiara.

Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime dimulai dari tahun 2009 yang bermula pada kerjasamanya dengan Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu bapak Nurdin Abdullah selaku Bupati dari Kabupaten tersebut, yang mana kerjasama tersebut berhasil menerima 202 unit kendaraan ambulance dan pemadam kebakaran.⁷ Kedekatan yang telah terbangun pada tahun 2009 itu yang dilakukan oleh bapak Nurdin Abdullah. Kemudian memberikan peluang kerjasama ketika bapak Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018 – 2023.

Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, solusi yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengejar

⁷ Pemprov Sulsel, 'Ehime Dan Kochi Toyota Serahkan 38 Unit Mobil Ambulance Dan Damkar Ke Sulsel', *Sulselprov.Go.Id*, 2019 <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/ehime-dan-kochi-toyota-serahkan-38-unit-mobil-ambulance-dan-damkar-ke-sulsel>> [accessed 29 September 2022].

ketertinggalannya salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama, dalam upaya peningkatan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang menjadi salah satu kunci utama. Maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime pada tahun 2020 dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pengolahan hasil laut, ada beberapa kerjasama di bidang lainnya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi kreatif, dan pertanian yang dilakukan dengan Prefektur Ehime. Maka dengan itu kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi dan inovasi demi mencapai kemajuan bersama.

Dalam meningkatkan produksi ikan tuna Sulawesi Selatan maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang dalam hal kerjasama *Sister Province*. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada poin pertama yaitu Budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang terkhusus pada produksi ikan tuna. Melalui kerjasama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berusaha untuk berinovasi dalam menjamin ketersediaan ikan tuna bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang dengan kerjasama yang dilakukan.

Penulis memilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai topik penelitian karena penulis melihat adanya potensi secara geografis yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan namun terdapat kendala dalam produksinya sehingga membuat hasil dari produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan menjadi rendah. Dari langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bekerja sama dengan Prefektur Ehime Jepang di bidang budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut. Maka penulis tertarik untuk menjadikan ini sebagai topik penelitian untuk melihat bagaimana suatu aktor *sub-state* memasuki dunia kerjasama internasional

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri.⁸

1.2 Fokus penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas serta fakta bahwa rendahnya hasil produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan dan dalam menjamin ketersediaan ikan tuna sendiri bagi penduduk lokal maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang dalam Budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang terkhusus pada Produksi ikan tuna. Maka penulis lebih berfokus pada Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang dalam Bidang Transfer teknologi dalam menangani permasalahan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas tentang rendahnya nilai produksi ikan tuna di sulawesi selatan dan semakin tingginya permintaan terhadap ikan tuna, maka penulis membuat rumusan masalah dan rancangan penelitian untuk menjawab pertanyaan tertentu secara spesifik, adapun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana strategi pelaksanaan kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang dalam pengembangan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan?

⁸ Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, 2013).

1.3 Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengetahui bagaimana pola kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang meningkatkan budidaya ikan tuna dan bagaimana pelaksanaan strategi budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai konsep Paradiplomasi dan konsep *Sister Province* bagi para akademisi dan pelajar terutama yang berasal dari latar belakang program studi ilmu hubungan internasional. konsep Paradiplomasi yang mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', atau pemerintah regional, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.

Selain itu penelitian ini juga diharap dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai *Sister Province* atau yang sering disebut provinsi kembar yang di dalamnya memuat kesepakatan antara dua daerah atau 2 aktor subnasional yang melintasi batas negara dengan tujuan bersama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai konsep paradiplomasi. Pemerintah daerah selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak membaaur ke dalam pergaulan masyarakat internasional. Daerah yang tidak terampil dalam pergaulan dunia pasti akan ketinggalan, sebab daerah itu hanya akan menjadi konsumen pasif saja dari seluruh proses perdagangan dunia atau kapitalisme global.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan skripsi khususnya yang berminat mengangkat topik yang berkaitan dengan kerjasama *Sister Province*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

Studi hubungan internasional kerjasama tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh aktor negara (*state*) saja, namun dengan berkembangnya tren diplomasi saat ini membuat kerjasama atau hubungan luar negeri dapat dilakukan oleh para aktor *sub-state*, *non-state* dan bahkan organisasi seperti IGO dan INGO. Kerjasama yang dilakukan oleh para aktor *sub-state* ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan regional yang lebih spesifik.

Berdasarkan pemaparan mengenai bagaimana suatu daerah menjalin hubungan dengan daerah di luar negeri dalam mencapai kepentingannya. Maka penulis menggunakan konsep paradiplomasi. Selain itu tujuan Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk meningkatkan nilai produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan dengan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang, maka penulis menggunakan konsep *Sister Province*. Ada pun konsep yang penulis gunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Paradiplomasi

Seperti yang dipelajari dalam studi ilmu hubungan internasional konsep paradiplomasi merupakan kegiatan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dengan cara berunding dalam membahas suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat membuat praktik diplomasi tidak lagi hanya untuk perdamaian tapi juga untuk kerjasama dalam menyelesaikan konflik, permasalahan yang sedang dialami suatu negara sehingga dapat

mencapai tujuan bersama. Praktik diplomasi saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara dan pihak asing, namun juga dilakukan oleh aktor non negara seperti organisasi internasional, INGO, IGO, dan MNC hingga pemerintah daerah atau pemerintahan regional, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

Partisipasi pemerintah regional Indonesia di dunia internasional berpedoman pada otonomi daerah dimana didalamnya mengatur mengenai setiap daerah diberikan Kebebasan dalam Mengelola dan Meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing.⁹ Politik paradiplomasi di Indonesia berkaitan dengan seberapa besar pembagian kedaulatan yang diberikan kepada daerah otonom dalam aktifitasnya menjalin hubungan dan kerja sama internasional secara luas. Kegiatan diplomasi yang dilakukan suatu pemerintah daerah dalam lingkup internasional diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, membangun relasi dengan pihak luar, membangun citra yang baik di lingkup internasional serta untuk mencapai kepentingan suatu daerah.

Dengan aktifnya pemerintah kota sebagai aktor maka akan dapat mempercepat terjadinya diplomasi total dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengoptimalkan seluruh jalur diplomasi yang ada. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota dalam upaya melakukan kerja sama internasional. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah:¹⁰

1. Hanya dapat melakukan kerja sama dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI;

⁹Takdir Mukti, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013.

¹⁰ Gilang Nur Alam and Sudirman Arfin, *Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City*.

2. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
3. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
6. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
7. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
8. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam aturan tersebut juga, terdapat syarat dimana pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama harus melaksanakan kerja sama internasional secara aman dari berbagai aspek yaitu aspek politis dimana dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah DiLuar

Negeri. Dengan ini kerjasama luar negeri yang dilakukan aktor sub-state memiliki landasan dan legalitas.¹¹

Tahapan – tahapan Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri, antara lain: ¹²

1. Penjajakan

Penjajakan dilakukan dengan saling tukar menukar informasi mengenai potensi yang dimiliki pihak mitra agar mengetahui kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan antara pihak terkait. Pertukaran ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

2. Penandatanganan Loi (Letter of Intent)

Setelah penjajakan apabila ada keinginan untuk bekerjasama dan mendapat sambutan positif dari masing – masing pihak, maka antara kedua belah dapat menandatangani Letter of Intent (LoI).

3. Penyusunan Rencana Kerjasama

Setelah ditandatanganinya LoI, Pemerintah Kota segera menyusun Rencana Kerjasama atau Term of Reference dan Plan of Action yang isinya menggambarkan maksud dan tujuan atau kepentingan masing-masing pihak dalam kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut.

4. Persetujuan DPRD

¹¹ 'PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri [JDIH BPK RI]', *JDIH BPK RI*, 2020 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>> [accessed 4 September 2022].

¹² 'PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri [JDIH BPK RI]'.

Rencana Kerjasama, Plan of Action dan Lol yang sudah ditandatangani kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.

5. Permintaan Fasilitas Pemerintah

Setelah adanya persetujuan DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk permohonan fasilitas kerjasama dimana nantinya akan ada anggaran yang dialokasikan untuk kerjasama tersebut, dan Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk menentukan pembahasan Draft MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

6. Penyusunan Draft Mou (Memorandum of Understanding)

MoU untuk kerjasama yang tergolong Perjanjian Internasional, penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum Interkem (antar kementerian) yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya. Forum Interkem kemudian membubuhkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat interkem disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan mitra kerjasama untuk mendapatkan tanggapan.

7. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

Draft MoU yang telah mendapatkan persetujuan mitra kerjasama luar negeri, oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Kota yang bersangkutan untuk proses usulan Surat Kuasa (Full Power). Pemerintah Kota selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa (Full Power) kepada Menteri Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan draft MoU yang telah diparaf. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri untuk penerbitan Surat Kuasa (Full Power) penandatanganan MoU kepada pejabat yang namanya tertera dalam Surat Kuasa (Full Power) sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Setelah Surat Kuasa (Full Power) terbit pejabat Pemerintah Kota/Walikota yang atas namanya diterbitkan Surat Kuasa (Full Power) dapat melakukan penandatanganan MoU dengan pejabat Pemerintah Kota mitra kerjasama di luar negeri. Penandatanganan dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri. Naskah MoU yang sudah ditandatangani dikirim kepada Kementerian Luar Negeri untuk disimpan sebagai Dokumen Negara. Kementerian Luar Negeri menerbitkan salinan resmi yang sah sebagai pegangan Pemerintah Kota dan Kementerian Dalam Negeri.

8. Pelaksanaan Kerjasama

Setelah MoU ditandatangani, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program – program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota membentuk tim kerja sebagai pelaksana harian dari hasil kegiatan yang disepakati.

Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang sah.

9. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga lain terkait akan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian dan hasil kerjasama sesuai Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

10. Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah Kota menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan program kerjasama tersebut sesuai format yang terdapat pada Instrumen Monitoring dan Evaluasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama selanjutnya dengan mitra lain.

Dengan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan percepatan pembangunan di berbagai sektor telah melakukan kerjasama luar negeri seperti Sister Province dan bekerjasama dengan INGO. Selain kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Prefektur Ehime Jepang, Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan juga bekerjasama dengan KSI (*Knowledge Sector Initiative*).

2.1.2 Sister Province

Kerjasama yang dilakukan antara aktor non-negara khususnya aktor subnasional dalam hubungan internasional mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor or 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjamin kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Kerjasama *Sister Province* atau dalam bahasa Indonesia disebut provinsi

kembar yang di dalamnya memuat kesepakatan antara dua daerah atau 2 aktor subnasional yang melintasi batas negara dengan tujuan membangun hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk¹³

Tujuan dari kerjasama *Sister Province* sendiri lebih banyak kepada pengembangan ekonomi ataupun peningkatan instrumen pembangunan dalam tata kelola kota serta cara untuk berbagi kebutuhan akan pengetahuan, sumber daya, teknologi, dan pakar di antara dua kota. Kehadiran kerjasama antar kota dari dua wilayah negara berbeda akan membawa suatu pembaharuan antara dua wilayah dan membantu adanya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Konsep kerjasama kota kembar ini dilaksanakan dengan aturan formal dan mengikat antara dua pemerintah lokal dari wilayah negara berbeda demi menciptakan kemajuan bagi kedua belah pihak.

Saat ini program *Sister Province* sudah menaikkan solidaritas dan perdamaian dunia melalui pertukaran kebudayaan antar kota yang melintas batas negara. Oleh karenanya, prospek ke depan dari jalinan kerjasama dalam bentuk *Sister Province* dapat menjadi alternatif bagi pembangunan negara-negara berkembang dan secara berkala karena pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan para ahli antara dua kota yang melakukan kerjasama.

Dari uraian diatas bisa diartikan secara sederhana bahwa kerjasama *Sister Province* merupakan hubungan mitra antara pemerintah lokal dari dua negara berbeda sebagai upaya peningkatan program pembangunan berkelanjutan Oleh karenanya, proses implementasi dari kerjasama *Sister Province* tersebut harus dievaluasi setiap waktu untuk

¹³ Suwarti Sari, 'Revitalisasi Kerjasama Sister Province Jawa Barat Dengan Negara Bagian Australia Selatan' <<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/55/43>> [accessed 22 April 2022].

memaksimalkan tujuan dari pembangunan daerah yang ingin dicapai melalui kerjasama tersebut.

Menurut Habib Alfaris dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Kerjasama DIY dan Kyoto dimana kerjasama yang terjalin sangat menguntungkan antara kedua belah pihak. Baik DIY dan Kyoto mendapatkan banyak hal yang tak ternilai dari adanya kerjasama yang sudah berlangsung hampir 4 dekade ini. Kerjasama ini memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang meliputi kegiatan yang dapat memperkuat kesepahaman mutual. Kerjasama ini di bidang pendidikan diisi dengan pertukaran pelajar dan berbagai lomba yang memungkinkan terjadi *sharing culture*.¹⁴

Kerjasama *Sister Province* ini dilandasi dengan perjalanan sejarah kedekatan dua kota utamanya yang diinisiasi oleh kedekatan pemimpin daerah masing-masing. Kedekatan Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hashida selaku gubernur Kyoto, yang dahulunya merupakan pasukan Jepang yang bertugas di Yogyakarta menjadi faktor penting yang sulit diabaikan. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan kerjasama tersebut, seperti diadakan kegiatan lomba melukis setiap tahunnya dan lukisan terpilih akan dibawa ke Kyoto untuk dipamerkan, mengadakan Jogja-Japan Week setiap dua tahun sekali dan mengadakan berbagai kunjungan kerja baik di Yogyakarta dan di Kyoto.

Pada perjalanan kerjasama, di tahun 2020 kerjasama ini ditangguhkan sementara karena kendala pandemi Covid-19 yang membuat seluruh energi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto

¹⁴ Habib Alfarisi, ‘Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional Diy Dan Kyoto: Sekarang Dan Masa Mendatang’, *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3.1 (2021), 18–30 <<https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.623>>.

perlu untuk dipusatkan pada penanganan pandemi. Akibatnya, sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dua kota.

Menurut Sanny Pestari Dewi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Kerjasama *Sister-Province* Antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kerjasama antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di tingkat provinsi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran budaya, sampai pada pengembangan desa. Pada tahun 2015, kerjasama sister-city ini mulai berfokus pada pengembangan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan dari Kementerian Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi. Perubahan kementerian tersebut sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Program pembangunan desa dari pemerintah pusat ini kemudian membuka peluang untuk membentuk kerjasama dengan negara lain, sehingga memberikan desa kesempatan tersendiri untuk bekerjasama dengan daerah lain diluar batas geografis negaranya.¹⁵

Provinsi Gyeongsangbuk-Do menjadi salah satu mitra kerjasama D.I. Yogyakarta dalam mewujudkan program pengembangan desa yang menjadi salah satu program besar pemerintahan Jokowi. Keberhasilan Korea Selatan membangun pedesaannya melalui konsep *Saemaul Undong* menjadi latar belakang kemitraan antara Indonesia dan

¹⁵ Sanny Pestari Dewi, ‘Analisis Implementasi Kerjasama *Sister-Province* Antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa’, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.5033>>.

Korea Selatan. Karakteristik dari konsep *Saemaul Undong* yang memiliki kemiripan dengan sistem gotong royong yang ada di Indonesia dilihat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa kembar. Selain itu, pengalaman sejarah sebagai negara yang pernah dijajah juga melatarbelakangi kesamaan karakter kedua negara untuk bisa membentuk kemitraan pada program pembangunan baik di pusat maupun daerah, dimana penelitian ini lebih berfokus pada konteks pembangunan desa.¹⁶

Adapun dalam penelitian saya berbeda dengan penelitian yang telah saya jelaskan sebelumnya dimana penelitian sebelumnya berisi mengenai kerjasama *sister province* yang telah berjalan cukup lama dan dapat di evaluasi hasil kerjasama dan juga dapat ditafsirkan masa depan kerjasamanya yang dapat diambil dari hasil kerjasama yang telah berlalu sebagai bahan evaluasi. Sementara dalam penelitian saya ini akan mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana pola kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang meningkatkan budidaya ikan tuna dan bagaimana pelaksanaan strategi budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang yang baru saja ditandatangani pada desember 2020.

Saat ini, pemerintah daerah telah memiliki peran dan kewenangan dalam pencapaian kepentingan nasional daerahnya melalui kerjasama antar pemerintah daerah dengan sub-bagian negara lain. Fenomena ini menimbulkan bentuk baru kerjasama internasional yang

¹⁶ Sanny Pestiari Dewi, 'Analisi Implementasi Kerjasama Sister-Province Antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.5033>>.

mana melibatkan satuan terkecil negara yaitu kota, desa, ataupun provinsi atau dikenal dengan kerja sama *sister-city*.

Berdasarkan pemaparan diatas dalam mengikuti perkembangan zaman serta untuk menyelesaikan permasalahan produksi ikan tuna yang ada maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Provinsi Ehime Jepang dengan kerjasama Sister Province yang salah satunya memuat budidaya ikan dan industri pelolahan hasil laut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berarti pengumpulan datanya menggunakan literatur atau penelitian penelitian terdahulu, berita, wawancara dan sumber tertulis lainnya. Penelitian ini tidak menggunakan teknik perhitungan murni tetapi lebih memanfaatkan informasi dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan wawancara. Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan penulis, yaitu untuk menjelaskan Bagaimana pola kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang meningkatkan budidaya ikan tuna dan bagaimana pelaksanaan strategi budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian kualitatif berguna untuk menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. Untuk studi kepustakaan penulis mengumpulkan dokumen-dokumen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang dengan pendekatan deskriptif.

Data kualitatif menurut Sugiyono, merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, dan juga memuat penjelasan tentang banyak proses yang terjadi di lingkungan setempat dimana pada hal ini yang menjadi kunci atau instrumennya adalah peneliti dengan

pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan.¹⁷ Dengan mengumpulkan data dari pustaka online dan data dari kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian data yang telah dikumpulkan direduksi untuk memisahkan data mana yang relevan dengan penelitian ini.

Proses selanjutnya adalah menggabungkan informasi yang telah dipisahkan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi pada kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang dalam upaya meningkatkan budidaya ikan tuna, serta dapat menggambarkan strategi budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mencari makna dari data yang telah di proses.

3.2 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Data yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan dari sumber sumber yang telah ada, seperti penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kerjakan, literatur, buku dan jurnal. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil laut. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan untuk mengingat peran peneliti sebagai instrumen dan pengumpul data yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang ada.

3.3 Lokasi Penelitian

¹⁷ Gamal Thabroni, 'Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - Serupa.Id', *Serupa.Id*, 2021 <<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>> [accessed 11 June 2022].

Penulis melakukan pengumpulan data secara online dari literatur yang telah ada dan juga dokumen dari kantor Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk kebutuhan literatur dan informasi, Penulis memanfaatkan teknologi untuk pengumpulan data, sebagai berikut.¹⁸

- a. Perpustakaan online dari beberapa e-jurnal, ebook dan website resmi
- b. Kantor Provinsi Sulawesi Selatan

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan studi pustaka atau *literature research*, dan dokumen. Peneliti menggunakan data sekunder atau data yang telah ada sebelumnya, dan melalui dokumen yang didapatkan penulis dari Kantor Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendapatkan izin. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder dimana Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan merupakan suatu telaah terhadap buku-buku, literatur serta laporan-laporan yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang lain, bukan oleh Peneliti itu sendiri. Data yang digunakan Penulis bersumber dari buku, e-journal, e-book, internet dan dokumen resmi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana menafsirkan dan menguraikan data yang bersamaan dengan fenomena yang sedang terjadi, data yang menunjukkan kualitas dengan menggambarkan kondisi yang sedang terjadi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang

¹⁸ MOU Antara Pemprov Sulsel Dan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang Mengenai Pembentukan Kerjasama Provinsi Bersaudara.

diteliti. Dengan teknik ini Penulis akan kembali menjabarkan lebih rinci mengenai topik yang akan diteliti. Adapun teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang akan digunakan Penulis, yaitu sebagai berikut.¹⁹

- a. *Data Condensation*, yaitu proses pengumpulan data-data yang diperlukan yang nantinya akan dipisahkan kemudian dipilih data mana yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Data ini menjelaskan mengenai tahapan pemilihan tema serta topik yang akan diteliti. Pada tahap ini Penulis mencari tahu bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota bandung. Data-data yang dipisahkan adalah, data yang berupa jurnal atau artikel, skripsi/penelitian, surat kabar, data yang bersumber dari buku atau buku elektronik, serta video yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
- b. *Data display*, yaitu tahap penyajian atau penampilan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat pada penelitian kualitatif peneliti dominan membuat teks naratif. Dari data data atau penelitian terdahulu, Penulis menampilkan narasi yang berkaitan dengan topik yang dipilih dan ditampilkan dalam bentuk deskriptif. Narasi tersebut berupa jurnal, skripsi, penelitian, surat kabar, buku, buku elektronik, hingga data yang berupa video kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. *Conclusion Drawing / Verification*, yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan diteliti serta

¹⁹ 'Pengumpulan Data Atau Data Collection Data Condensation Penyajian Data Atau Data Display Penarikan Kesimpulan Verifikasi Atau Conclusion Drawing Verifying', *123dok* <<https://text-id.123dok.com/document/nzwogpl7y-pengumpulan-data-atau-data-collection-data-condensation-penyajian-data-atau-data-display-penarikan-kesimpulan-verifikasi-atau-conclusion-drawing-verifying.html>> [accessed 15 June 2022].

melampirkan bukti bukti konkrit yang mendukung kebenaran data. Pada tahap ini Penulis membuat kesimpulan mengenai topik yang dibahas dan melampirkan bukti-bukti yang valid mengenai data yang dikumpulkan.

3.6 Tahap - Tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, Penulis menjelaskan mengenai latar belakang mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan dengan melihat jumlah nilai produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan yang terbilang rendah dikarenakan belum adanya teknologi yang memadai dalam meningkatkan produksi ikan tuna, Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah untuk Melakukan Kerjasama dengan suatu daerah di luar negeri. Selain itu pada bab ini Penulis menjelaskan mengenai fokus penelitian dan rumusan masalah yang dijadikan pedoman penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti oleh Penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini Penulis menjelaskan mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam proses penelitian. Penulis menggunakan konsep yang menjelaskan bagaimana Kerjasama luar negeri dapat dilakukan oleh sub-state actor atau yang kita sebut dengan Para diplomasi. Serta konsep Sister Province yang merupakan salah satu model Kerjasama antara Provinsi dengan Provinsi luar negeri dalam pembangunan yang menggunakan sistem dan metode pengamanan yang lebih modern dan inovatif.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang uraian metode penelitian yang digunakan Penulis, mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Penulis akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini, yaitu bagaimana Strategi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan produksi ikan tuna dengan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang.

BAB V KESIMPULAN, pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan mengenai data yang telah diteliti dalam penelitian, saran serta kendala-kendala yang penulis alami dalam proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sulawesi Selatan masih mengalami keterbatasan dalam alat produksi ikan tuna yang sebelumnya belum dimiliki, Sulawesi Selatan hanya menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya dengan menggunakan pancing ulur (*Hand Line*) disekitar rumpon. Sarana dan prasarana perikanan tuna di Sulawesi Selatan hampir semua berasal dari komponen lokal, kecuali mesin kapal yang merupakan komponen impor. Sarana dan prasarana tersebut adalah rumpon, kapal dan perlengkapannya, alat tangkap pancing, es balok untuk menjaga kesegaran tuna.²⁰ Hal ini kemudian yang mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produksi ikan tuna.

Terdapat beberapa permasalahan pokok terkait dengan kapasitas dan kualitas di rantai pasok nelayan. Pertama, tingkat produksi Ikan Tuna sangat dipengaruhi oleh kapasitas kapal. Saat ini kapasitas kapal penangkap Ikan Tuna antara 20 hingga 25 ton. Dengan kapasitas tersebut, kapal nelayan kesulitan untuk menjelajahi wilayah migrasi tuna yang lebih lebih jauh. Kondisi kemudian mempengaruhi volume perolehan ikan tangkapan nelayan akibat dari perbedaan potensi di setiap jalur migrasi tuna.²¹ Kedua kapasitas sarana penyimpanan kapal tidak memadai. Kapasitas daya tampung kapal dirancang sedemikian rupa mengikuti struktur dan kapasitas maksimum kapal. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap potensi tangkap saat musim tangkap. Dalam kondisi tertentu, utamanya di musim puncak, wadah penampungan kapal tidak mencukupi

²⁰ Sudirman, Gagaring Pagalung, Justin, Andi Aswan, and Firman, 'Profil Perikanan Tuna Di Sulawesi Selatan', *Universitas Hasanuddin*, 2020

²¹ Sudirman, Gagaring Pagalung, Justin, Andi Aswan, and Firman, 'Profil Perikanan Tuna Di Sulawesi Selatan', *Universitas Hasanuddin*, 2020

untuk menampung ikan hasil tangkapan sehingga nelayan terpaksa pulang lebih awal. Daya tampung ini juga mempengaruhi jumlah es balok yang akan disimpan untuk keperluan perawatan ikan. Ketiga, terkait dengan wadah penyimpanan ikan, wadah yang digunakan nelayan relatif tidak memadai. Kualitas wadah hanya mampu mendinginkan ikan yang tersimpan pada titik 0 derajat, sementara persyaratan dibutuhkan titik beku hingga -15 derajat. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah penampungan yang didesain untuk keperluan penyimpanan ikan nelayan yang sesuai standar untuk mempertahankan kualitas Ikan Tuna hasil tangkapan nelayan.

Selain itu terdapat kekurangan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan terkait dengan perlakuan penanganan tangkapan ikan. Ikan yang ditangkap dan telah berada di atas kapal umumnya membutuhkan waktu hingga ikan tersebut mati. Saat kondisi tersebut, umumnya terjadi penurunan atau kerusakan kualitas daging ikan. Seharusnya, nelayan menusuk pada bagian kepala ikan yang menembus bagian otak untuk mematikan ikan tersebut lebih cepat. Masih terkait dengan kualitas SDM nelayan, umumnya tidak mengetahui dengan tepat klasifikasi berdasarkan kualitas ikan yang diinginkan oleh eksportir. Rendahnya pengetahuan itu membuat nelayan seringkali tidak memperhatikan penanganan ikan baik saat penangkapan, penanganan pasca penangkapan, dan saat penyimpanan di wadah penampungan ikan.

Jepang merupakan salah satu negara dengan industri perikanan terbaik di dunia. Jepang menjadi satu dari negara di dunia yang memiliki pasar grosir hasil laut terbesar di dunia. Hal ini terfokus di Pasar Tsukiji yang telah banyak dikenal secara internasional dibandingkan dengan pasar ikan lainnya di Jepang. Di Jepang dalam bidang perikanan

telah mengembangkan teknologi untuk produksinya.²² Teknologi terus dikembangkan agar dapat membantu manusia dalam berbagai bidang untuk menangani tantangan global yang ada. Salah satu teknologi yang dimiliki Jepang adalah *Deep Sea Water*. Teknologi *Deep Sea Water* adalah teknologi yang memanfaatkan tekanan air laut dalam yang kemudian didorong ke atas permukaan, teknologi ini bermanfaat untuk mengalirkan listrik ke pulau-pulau kecil, selain itu air dingin yang berasal dari dalam laut dapat juga digunakan untuk budidaya ikan tuna.²³

4.1 Strategi Pelaksanaan Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang Dalam Pengembangan Produksi Ikan Tuna.

Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pengikatan produksi ikan tuna mengambil langkah kerjasama luar negeri dengan daerah di luar negeri atau fenomena ini lebih sering kita sebut sebagai Pradiplomasi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan daerah. Di Provinsi Sulawesi selatan Kapasitas kapal yang digunakan nelayan pada umumnya yaitu 10 sampai 30 GT (Gross Tonnage) dengan ukuran kapal yang digunakan nelayan pancing ulur yaitu panjang 15 meter, lebar 1.8 meter, dan tinggi 1.2 meter. Selain kapal itu untuk mempermudah pemancingan nelayan juga menggunakan kapal sampan. Kualitas wadah penyimpanan hanya mampu mendinginkan pada titik 0 derajat, sementara wadah yang dibutuhkan yaitu hingga -15 derajat.

²² Wahyu adityo Prodjo, 'Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Industri Perikanan Di Jepang', *Kompas.Com*, 2019 <<https://ohayojepang.kompas.com/read/1642/hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-industri-perikanan-di-jepang?page=all>> [accessed 15 June 2022].

²³ Tiara Sutari, 'Jepang Sodorkan RI Teknologi Budidaya Tuna Laut Dalam', *CNN Indonesia*, 2016 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161227142827-92-182378/jepang-sodorkan-ri-teknologi-budidaya-tuna-laut-dalam>> [accessed 15 June 2022].

Di Jepang sendiri memiliki teknik penangkapan yang cukup moderen antara lain seperti : penangkapan ikan Bonito dengan kail satu mata, penangkapan ikan tuna dengan metode *long line fishing* (memancing tali panjang), penangkapan cumi dengan alat tangkap jigger, metode cantrang untuk bawah laut, metode *roundhaul fishery*, metode jaring *drift netting*, metode *fixed net fishing*, serta metode perangkap kepiting dan udang.²⁴ Dalam metode pengkapan ikan tuna di Jepang sebagai negara yang terkenal dalam produksinya memiliki kapal Long Line dirancang khusus untuk menangkap ikan dengan alattangkap longline atau biasa disebut rawai. Kapal Long Line di desain khusus sekaligus untuk menyimpan, mendinginkan, dan mengangkut ikan hasil tangkapan sampai ke pelabuhan. Kapal Long Line yang berukuran padaumumnya berukuran 30 - 100 GT yang dioperasikan untuk menangkap ikan jenis tuna termasuk cakalang dan albacore dengan hasil sampingan ikancucut, sehingga sering pula kapal tersebut disebut kapal tuna Long Line. Panjang 17 meter, lebar 4.25 meter, tinggi 4 meter.²⁵

Dalam bidang perikanan kerjasama yang akan dijalankan adalah dengan melakukan transfer teknologi pembudidayaan di Sulawesi Selatan. Hal yang mendasar yang menjadi alasan kerjasama dalam bidang budidaya perikanan di mana Pemerintah Prefektur Ehime menilai salah satu jenis ikan yang berpotensi dibudidayakan yaitu ikan tuna.²⁶ Sebab jika dilihat dari iklim, masa pemeliharaan ikan tuna bisa lebih mudah dilakukan di

²⁴ Karaksa Media Partner, 'Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Industri Perikanan Di Jepang', *Ohayojepang.Kompas.Com*, 2019
<<https://ohayojepang.kompas.com/read/1642/hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-industri-perikanan-di-jepang?page=all>> [accessed 29 September 2022].

²⁵ Eflysa Aprilia and others, 'Alat Dan Kapal Penangkap Ikan : Long Line (Rawai)', 2018.

²⁶ Andini Ristyanigrum, 'Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur Di Sulsel', *Bisnis.Com*, 2019 <<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>> [accessed 30 August 2022].

Sulawesi Selatan. Perbedaan suhu yang dimiliki Jepang dan Indonesia menjadi faktor pembanding, Jepang dengan suhu udara yang dingin membuat masa pemeliharaan ikan tuna butuh waktu hingga tiga tahun. Sementara di Indonesia, hanya membutuhkan masa pemeliharaan sekitar 1,5 tahun.²⁷ Namun dalam produksi ikan tuna Sulawesi Selatan masih terbilang lambat dalam hal teknologi dan praktik budidayanya yang masih tradisional, dengan menggunakan cara pancing *hand line* disekitar rumpon, sedangkan di Jepang cara pancingnya menggunakan cara *long line* yang mencakup kawasan yang lebih luas.

Berikut table produksi ikan tuna tiga lokasi daerah yang ditawarkan oleh pemerintah Sulawesi selatan antara lain Kepulauan Selayar, Pangkep dan Bulukumba.

Tabel 4.1 Produksi ikan tuna pada tahun 2017²⁸

No	Daerah	Jenis ikan Tuna	
		Tuna gigi anjing	Tuna mata besar
1.	Selayar	137.0 ton	15.7 ton
2.	Pangkep	-	81.3 ton
3.	Bulukumba	-	927.0 ton
		1.161 ton	

Sumber : Website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tabel ini bisa dilihat di tahun 2017 total tangkapan tuna yaitu 1.161 ton yang di tangkap dari tiga wilayah penangkapan, ada dua

²⁷ Andini Ristyanigrum, 'Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur Di Sulsel', *Bisnis.Com*, 2019 <<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>> [accessed 30 August 2022].

²⁸ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2017*, 2018.

jenis tuna yang ditangkap di daerah Selayar namun di dua wilayah lainnya tidak ada.

Tabel 2. Produksi ikan tuna pada tahun 2018²⁹

No	Daerah	Jenis ikan Tuna		
		Tuna gigi anjing	Tuna mata besar	Tuna sirip Biru
1.	Selayar	112.4 ton	10.2 ton	-
2.	Pangkep	-	-	-
3.	Bulukumba	-	4.240.6 ton	4.121.3 ton
Total		8.484.5 ton		

Sumber : Sumber : Website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tabel tahun 2018 ini mengalami kenaikan total tangkapan mencapai 8.484.5 ton di tiga wilayah penangkapan namun hanya dua wilayah yang memiliki hasil tangkapan yang jenis tunanya berbeda.

Table 3. Produksi ikan tuna pada tahun 2019³⁰

No	Daerah	Jenis ikan Tuna		
		Tuna gigi anjing	Tuna mata besar	Tuna sirip Biru
1.	Selayar	108.7 ton	549.2 ton	-
2.	Pangkep	-	52.3 ton	-
3.	Bulukumba	1.969.8 ton	-	4.874.9 ton
		7.554.9 ton		

Sumber : Website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tabel tahun 2019 ini mengalami penurunan, total tangkapan mencapai 7.554.9 ton di tiga wilayah penangkapan dengan tiga

²⁹ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2018, 2019*.

³⁰ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2019*.

jenis tuna dengan berbeda jenis tangkapan dan jumlah tangkapan yang berbeda.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi ikan tuna di Sulawesi selatan belum mengalami pertumbuhan produksi yang signifikan di setiap daerah dalam table di tunjukkan bahwa setiap tahunnya daerah di Sulawesi Selatan ini menghasilkan ikan tuna kadang ada dan kadang juga tidak. Terlihat pada tabel tahun 2017 tiga daerah diatas Selayar, Pangkep, dan Bulukumba menghasilkan jenis ikan tuna mata besar namun pada tahun 2018 daerah pangkep tidak lagi menghasilkan jenis tuna mata besar. Selanjutnya pada tahun 2019 kemudian daerah bulukumba yang tidak menghasilkan ikan tuna mata besar. Maka dari hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk mengembangkan sistem produksi ikan tuna, melalui kerjasama dengan Ehime Jepang.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengemukakan potensi budidaya ikan tuna cukup besar dalam memberi andil untuk menopang pendapatan daerah di sektor perikanan. Bahkan dalam satu masa pemeliharaan di satu tempat penampungan, penjualan ikan tuna bisa mencapai Rp 27 miliar, ikan tuna yang dipelihara dalam satu tempat penampungan ikan setidaknya bisa menampung 1.500 ekor dengan berat mencapai 100 kilogram.³¹ Maka menurut penulis bidang kerjasama budidaya hasil laut dalam hal ini jenis ikan tuna, yang mana Sulawesi Selatan sendiri masih menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya dapat mengembangkan sistem produksi ikan tuna di Sulawesi

³¹Andini Ristyanigrum, 'Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur Di Sulsel', *Bisnis.Com*, 2019 <<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>> [accessed 30 August 2022].

Selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan Kerjasama Provinsi Sulawesi dan Prefektur Ehime dimana Jepang tertarik untuk melakukan Kerjasama dalam beberapa bidang terutama dalam bidang akuakultur. Dimana menurut pihak Ehime, Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi yang besar untuk budidaya hasil laut mengingat secara geografis wilayah Sulawesi Selatan dikelilingi perairan dan kepulauan.

Pemerintah daerah dalam melakukan Kerjasama luar negeri dengan daerah di luar negeri memiliki Tahap-tahap pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri. Melalui peraturan ini diharapkan Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan Tahapan – tahapan kerjasama daerah dengan pemerintah diluar negeri, maka berikut rincian tahap yang dilalui dalam kerjasama ini :

1. Penjajakan

Dalam tahap ini dilakukan dengan saling menukar informasi mengenai potensi yang dimiliki antara dua pihak. Hal ini diperlukan agar kedua pihak tahu bidang apa atau aspek mana yang dapat dilakukan kerjasama.

Gambar 4.1 Kunjungan Gubernur Ehime di Provinsi Sulawesi Selatan³²



Sumber : Website Resmi Provinsi Sulawesi selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dalam upaya pengembangan sistem budidaya perikanan dan industri perairan dalam hal ini adalah produksi ikan tuna mengambil langkah Kerjasama *sister province*. Pada tanggal 15 januari 2019 Gubernur Ehime Jepang, Tokihiro Nakamura melakukan kunjungan kerja di Sulsel selama dua hari untuk melakukan kerjasama dengan Sulsel di berbagai bidang. Terdapat 22 delegasi yang datang diantaranya adalah pengusaha dan perbankan, tujuan dari kunjungan ini adalah pihak jepang akan mengembangkan model operasi pengembangan akuakultur.³³ Dalam hal ini yaitu

³² 'Gubernur Sulsel Dan Gubernur Ehime Jepang Akan Melakukan Lol Dalam Berbagai Bidang', *Provinsi Sulawesi Selatan*, 2019 <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/gubernur-sulsel-dan-gubernur-ehime-jepang-akan-melakukan-loi-dalam-berbagai-bidang>> [accessed 4 September 2022].

³³ 'Gubernur Sulsel Dan Gubernur Ehime Jepang Akan Melakukan Lol Dalam Berbagai Bidang'.

mengembangkan budidaya ikan tuna, dan beberapa komoditas ekspor lainnya.

Saat kegiatan kunjungan awal yang dilakukan oleh pihak Prefektur Ehime terdapat beberapa strategi dalam pelaksanaan kerjasama di Bidang budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut pada komoditas ikan tuna dalam hal transfer teknologi antara lain sebagai berikut :

2. Penandatanganan Lol (Letter of Intent)

Ketika tahap penjajakan selesai dan keinginan untuk melakukan Kerjasama mendapat sambutan positif dari masing masing pihak maka tahap selanjutnya dalam penandatanganan Lol (*Letter of Intent*), sebagai dokumen awal untuk dilanjutkan dengan bentuk perjanjian kerjasama.

Gambar 4.2 Penandatanganan *Letter of Intent* (Lol)



Sumber : Website resmi Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam mewujudkan kerjasama itu, Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura hadir di Makassar untuk menandatangani kesepakatan bersama atau *Letter of Intent* (Lol) pada tanggal 15 Januari

2020 dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.³⁴ Tokihiro mengatakan, Prefektur Ehime memiliki akuakultur produksi ikan dengan hasil budidaya nomor satu.³⁵ Akuakultur merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. Dalam Surat tersebut kedua belah pihak mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Serta niat untuk membuat pernyataan kehendak, tentang penguatan sumber daya manusia, perdagangan, kepariwisataan, pertanian, perikanan dan peternakan, pendidikan, budaya dan olahraga dan Lol ini dapat diperluas ke berbagai bidang lainnya.

3. Penyusunan Rancangan Kerjasama

Setelah penandatanganan Lol tersebut pada tanggal 15 januari 2019 setelah kurang lebih hampir satu tahun dalam proses pembuatan Rencana Kerjasama atau *Term of Reference dan Plan of Action* yang isinya menggambarkan maksud dan tujuan atau kepentingan masing-masing pihak dalam kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut.

4. Persetujuan DPRD

Rancangan kerjasama yang telah di buat dan juga Lol yang telah di tandatangani kemudian di ajukan pada DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan. Pemerintah Indonesia pun memberikan dukungan penuh melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang - undang nomor or 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjamin

³⁴ 'Pemprov Sulsel Dan Provinsi Ehime Jepang Teken Kerjasama Penguatan Berbagai Bidang', *Sulselprov.Go.Id*, 19AD <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-sulsel-dan-provinsi-ehime-jepang-teken-kerjasama-penguatan-berbagai-bidang>> [accessed 30 August 2022].

³⁵ Andini Ristyanigrum, 'Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur Di Sulsel', *Bisnis.Com*, 2019 <<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>> [accessed 30 August 2022].

kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri.³⁶ Maka dari peraturan yang ada pun daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri dengan daerah lain di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor *sub state* ini kemudian diberi istilah Paradiplomasi.

5. Pemintaan Fasilitas Pemerintah

Setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi, Langkah selanjutnya adalah pengajuan surat kepada Menteri Dalam Negara Republik Indonesia untuk pengajuan permohonan fasilitas dalam alokasi anggaran untuk kerjasama tersebut, dimana surat ini kemudian nantinya akan menjadi syarat dalam menentukan pembahasan Draft MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga terkait seperti Dinas Kelautan Dan Perikanan dan bidang terkait lainnya.

6. Penyusunan Draft MoU

MoU untuk kerjasama yang tergolong Perjanjian Internasional, penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum antar kementerian yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya. Forum antar kementerian kemudian mendapatkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat tersebut disampaikan oleh

³⁶ Takdir Mukti, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan mitra kerjasama untuk mendapatkan tanggapan.

Dalam MoU tersebut memuat beberapa poin ruang lingkup Kerjasama antara lain:³⁷

1. Budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut
2. Pertanian dan perkebunan
3. Pembangunan ekonomi kreatif
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

7. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

Maka pada tanggal 16 Desember 2020 MoU kerjasama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang resmi ditandatangani.

Gambar 4.3 Penandatanganan MoU Kerjasama Sister Province antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang³⁸



Sumber : Website resmi Provinsi Sulawesi Selatan

³⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2019, 2020*.

³⁸ Diskominfo, 'Pemprov Teken MoU Sister Province Dengan Ehime Jepang', *Provinsi Sulawesi Selatan*, 2020 <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-teken-mou-sister-province-dengan-ehime-jepang>> [accessed 4 September 2022].

Setelah tandatangan Mou Maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program – program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota membentuk tim kerja sebagai pelaksana harian dari hasil kegiatan yang disepakati. Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang sah.

Setelah penandatanganan MoU, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program – program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan dengan pembentukan tim kerja sebagai pelaksana dan mengalokasikan dana yang timbul dalam kerjasama ini melalui APBD dan sumber lain yang sah. Berikut rencana agenda pelaksanaan yang akan di jalankan dalam kerjasama ini, sebagai berikut :

a. Peninjauan lokasi pengembangan jenis ikan tuna

Gubernur Prefektur Ehime berencana akan meninjau sejumlah lokasi di Sulawesi Selatan untuk pengembangan jenis ikan tuna. Untuk rencana kerjasama tersebut, saat ini dilakukan feasibility study (studi kelayakan). Pihak Jepang akan mengirim orang guna meninjau lokasi daerah yang ditawarkan, antara lain Kepulauan Selayar, Pangkep dan Bulukumba. Pihak Jepang juga meminta segera disiapkan data potensi ikan laut di Sulawesi Selatan.³⁹

Menurut penulis peninjauan lokasi ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana langkah awal atau jenis teknologi mana yang dapat lebih diutamakan terlebih dahulu oleh Prefektur Ehime. Selain itu Prefektur

³⁹ 'Kerjasama Budidaya Perikanan, Sulsel Kirim SDM Ditraining Ke Jepang - Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan', *Humas.Sulselprov.Go.Id*, 2019 <<https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2019/03/19/kerjasama-budidaya-perikanan-sulsel-kirim-sdm-ditraining-ke-jepang/>> [accessed 30 August 2022].

Ehime juga akan membawa beberapa pengusaha di sektor perikanan yang berencana melakukan relokasi budi daya ikan tuna ke Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari bentuk kerjasama *sister province* yaitu pengembangan ekonomi ataupun peningkatan instrumen pembangunan dalam tata kelola kota serta cara untuk berbagi kebutuhan akan pengetahuan, sumber daya, teknologi, dan pakar di antara dua kota.

b. Pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) ke Jepang untuk menjalani training atau pelatihan.

Strategi pelaksanaan lainnya yang dijalankan dalam kerja sama ini adalah dengan mengirim kirim 10 orang magang di sana. Dari 10 itu, lima dari pihak mitranya di sini dan lima dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Utusan yang dikirim dari pihak provinsi nanti akan menjadi fasilitator atau trainer dan tenaga penyuluh. Sementara dari perusahaan mitra, nanti akan dipekerjakan di perusahaan.⁴⁰ Pelatihan ini dimaksud agar konsep pengembangan produksi ikan tuna di Prefektur Ehime dapat di contoh atau di terapkan juga di Sulawesi Selatan, sehingga konsep Kerjasama *sister province* atau kota kembar ini dapat tercapai. Seperti yang telah penulis dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *sister city* atau kota kebar dimana kota yang bekerjasama didalamnya dapat mengambil konsep pengembangan atau strategi dalam pengembangan perekonomian atau istilah lainnya adalah pertukaran konsep.

c. Membawa investor dari Jepang

Secara umum kerja sama yang akan dijalankan tidak langsung berupa investasi melainkan pertukaran transfer teknologi. Namun Prefektur

⁴⁰ 'Kerjasama Budidaya Perikanan, Sulsel Kirim SDM Ditraining Ke Jepang - Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan'.

Ehime juga akan mengundang investor dari Jepang untuk masuk ke Sulawesi Selatan. Kerjasama *sister province* ini dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, dan menciptakan lapangan kerja di Sulawesi selatan dengan adanya investor dari Jepang yang masuk.

Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan Kerjasama yang telah ditandatangani sesuai dengan isi MoU dan rancangan agenda pelaksanaan yang telah dijabarkan diatas., Namun dalam pelaksanaannya terjadi kendala pada internal Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di gantikannya bapak Nurdin Abdullah dengan bapak Andu Sudirman Sulaiman sebagai PLT (Pelaksanaan Tugas). Pergantian ini kemudian menghasilkan kebijakan baru, yang akhirnya kerjasama ini belum ada kepastian kelanjutannya.

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah dan mencapai kepentingan regional. Kerjasama ini disebut sebagai Kerjasama *sister province*, dimana kerjasama ini dilakukan dengan tahap melihat bagaimana kondisi dan apa yang dapat diterapkan di daerah mitra, hal ini dapat ditinjau dari persamaan dan potensi dapat dilaksanakannya metode yang sama di daerah mitra. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan dan juga dapat memberikan peluang masuknya investor asing, serta meningkatkan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan, sama seperti keberhasilan yang dimiliki Jepang dalam memproduksi ikan tuna.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kerjasama sister province yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa bidang. Dimana salah satunya adalah bidang budidaya hasil laut, dimana salah satu komoditas unggulan Sulsel di bidang hasil laut adalah ikan tuna. Dalam kerjasama ini yaitu berupa transfer teknologi, meskipun tidak langsung pada tahap transfer teknologi namun kerjasama ini disusun dalam strategi pelaksanaan yang cukup tertata. Dimana strategi yang pertama yaitu Melakukan pengecekan lokasi, kedua yaitu mengirim tiga orang ke Prefektur Ehime untuk melakukan pelatihan, dan juga mengundang investor dari Jepang.

Kerjasama yang dilakukan ini diharap dapat meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan dan dapat meningkatkan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan. *Sister Province* dapat menjadi konsep kerjasama yang baik ketika dua daerah dapat saling berbagi konsep pengembangan, kemudian konsep yang telah berhasil diterapkan oleh salah satu pihak diterapkan juga di daerah pihak yang bekerjasama dengannya, hal ini dapat memberikan langkah yang baik dalam mencapai kepentingan regional.

Namun akibat permasalahan internal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan membuat kerjasama ini tidak berjalan dengan semestinya. Maka Hingga saat ini kerjasama ini belum memiliki kejelasan apakah PLT yang menjabat akan melanjutkan kerjasama ini atau tidak.

5.2 Saran

Dalam era globalisasi saat ini maka suatu daerah harus mencoba untuk membuka diri dan masuk di dunia internasional dengan adanya kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor sub-state maka daerah dapat menentukan langkah dalam meningkatkan pembangunan dan pendapatannya, Namun perlu diperhatikan bahwa kerjasama juga memerlukan strategi pelaksanaan sehingga dalam kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor *sub-state* dapat dijalankan dengan tepat dan mencapai tujuan antara kedua pihak. Menurut penulis sendiri dalam kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya dapat lebih di perhitungkan, bahkan jika terjadi pergantian pemimpin yang baru perlu untuk memperhatikan apa yang sebelumnya di buat oleh pemimpin sebelumnya dapat membawah manfaat yang baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mukti, Takdir, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013

Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*
(Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, 2013)

Sudirman, Gagaring Pagalung, Justin, Andi Aswan, and Firman, 'Profil Perikanan
Tuna Di Sulawesi Selatan', *Universitas Hasanuddin*, 2020

Domuken :

'PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah
Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah
Dengan Lembaga Di Luar Negeri [JDIH BPK RI]', *JDIH BPK RI*, 2020
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>> [accessed 4 September 2022]

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan'

Jurnal & Artikel :

Alam, Gilang Nur, and Sudirman Arfin, *Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung
Melalui Kerja Sama Sister City*

Alfarisi, Habib, 'Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional Diy Dan Kyoto:
Sekarang Dan Masa Mendatang', *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan
Dan Sosial*, 3.1 (2021), 18–30 <<https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.623>>

Dewi, Sanny Pestari, 'Analisis Implementasi Kerjasama Sister-Province Antara
Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan
Desa', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2.1 (2020), 42
<<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.5033>>

'Pemprov Sulsel Dan Provinsi Ehime Jepang Teken Kerjasama Penguatan

Berbagai Bidang', *Sulselprov.Go.Id*, 19AD

<<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-sulsel-dan-provinsi-ehime-jepang-teken-kerjasama-penguatan-berbagai-bidang>> [accessed 30 August 2022]

'Pengumpulan Data Atau Data Collection Data Condensation Penyajian Data

Atau Data Display Penarikan Kesimpulan Verifikasi Atau Conclusion Drawing Verifying', *123dok* <<https://text-id.123dok.com/document/nzwogpl7y-pengumpulan-data-atau-data-collection-data-condensation-penyajian-data-atau-data-display-penarikan-kesimpulan-verifikasi-atau-conclusion-drawing-verifying.html>> [accessed 15 June 2022]

Prodjo, Wahyu adityo, 'Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Industri Perikanan Di Jepang', *Kompas.Com*, 2019

<<https://ohayojepang.kompas.com/read/1642/hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-industri-perikanan-di-jepang?page=all>> [accessed 15 June 2022]

Ristyanigrum, Andini, 'Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur Di Sulsel', *Bisnis.Com*, 2019

<<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>> [accessed 30 August 2022]

Sari, Suwarti, 'Revitalisasi Kerjasama Sister Province Jawa Barat Dengan Negara Bagian Australia Selatan'

<<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/55/43>> [accessed 22 April 2022]

Sutari, Tiara, 'Jepang Sodorkan RI Teknologi Budidaya Tuna Laut Dalam', *CNN Indonesia*, 2016

<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161227142827-92-182378/jepang-sodorkan-ri-teknologi-budidaya-tuna-laut-dalam>> [accessed 15 June 2022]

Thabroni, Gamal, 'Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - Serupa.Id', *Serupa.Id*, 2021 <<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>> [accessed 11 June 2022]

Tim Redaksi LautSehatID, 'Hasil Laut Indonesia Yang Diekspor Ke Luar Negeri | LautSehat.ID', *Lautsehat.ID*, 2021 <<https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/hasil-laut-indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/>> [accessed 15 June 2022]

Website :

'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/indicator/56/1516/1/nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html>> [accessed 17 June 2022]

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2017*, 2018

———, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2018*, 2019

———, *Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2019*, 2020

Diskominfo, 'Pemprov Teken MoU Sister Province Dengan Ehime Jepang', *Provinsi Sulawesi Selatan*, 2020 <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-teken-mou-sister-province-dengan-ehime-jepang>> [accessed 4 September 2022]

'Gubernur Sulsel Dan Gubernur Ehime Jepang Akan Melakukan Lol Dalam Berbagai Bidang', *Provinsi Sulawesi Selatan*, 2019 <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/gubernur-sulsel-dan-gubernur-ehime-jepang-akan-melakukan-loi-dalam-berbagai-bidang>> [accessed 4 September 2022]

'Kerjasama Budidaya Perikanan, Sulsel Kirim SDM Dittraining Ke Jepang - Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan', *Humas.Sulselprov.Go.Id*, 2019 <<https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2019/03/19/kerjasama->

budidaya-perikanan-sulsel-kirim-sdm-ditraining-ke-jepang/> [accessed 30
August 2022]

'Produksi Perikanan', *Statistik KKP*

<<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2#panel-footer>> [accessed
17 June 2022]

LAMPIRAN :

1. Dokumen MoU Kerjasama Provinsi Sulawesi selatan dan Prefektur Ehime
Jepang

1. Dokumen MoU Kerjasama Provinsi Sulawesi selatan dan Prefektur

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PEFKUTUR EHIME
JEPANG
MENGENAI
PEMBENTUKAN KERJA SAMA PROVINSI BERSAUDARA**

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang untuk selanjutnya secara individu disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak",

MENGAKUI adanya hubungan persahabatan dan kerja sama yang erat antara Republik Indonesia dan Jepang;

MERUJUK pada Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 15 Januari 2019, di Makassar;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama di antara Para Pihak melalui pembentukan hubungan antarpemerintah dan antarmasyarakat;

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk Kerja Sama Provinsi Bersaudara antara Para Pihak dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan hubungan persahabatan antara Para Pihak melalui kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Para pihak bersepakat bahwa ruang lingkup MSP ini adalah sebagai berikut:

- a. Budidaya Ikan dan Industri Pengolahan Hasil Laut;
- b. Pertanian dan Perkebunan;
- c. Pembangunan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Pengaturan Teknis

1. Untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini, Para Pihak wajib membuat pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan ketentuan MSP ini, yang wajib mencakup ruang lingkup kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
2. Pengaturan tersebut wajib sesuai dengan MSP ini, dan wajib memerinci program atau jadwal proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang dilaksanakan Para Pihak serta hal-hal lainnya yang diperlukan.
3. Dengan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak, salah satu Pihak dapat mengundang pihak ketiga yang terkait untuk terlibat dalam pelaksanaan MSP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 serta mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam masing-masing program untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua kota.
4. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditandatangani paling lambat 1 (satu) tahun setelah penandatanganan MSP ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan MSP ini wajib dibebankan kepada masing-masing Pihak dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personel.

Pasal 5

Kelompok Kerja Bersama

1. Para Pihak wajib membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk merencanakan, menyiapkan dan merekomendasikan program serta mengawasi dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di bawah MSP ini.
2. Anggota dari Kelompok Kerja Bersama tersebut akan terdiri dari perwakilan Para Pihak dan instansi pemerintah terkait. Jika dibutuhkan, Kelompok Kerja Bersama dapat mengundang pihak swasta sesuai kesepakatan tertulis bersama Para Pihak.
3. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun atau sebagaimana disepakati, secara bergantian di Sulawesi Selatan atau Ehime. Apabila pertemuan tahunan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dokumen-dokumen wajib dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

Pasal 6

Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk mengamati kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang ditandai sebagai "rahasia" yang diterima dari atau dipasok oleh Pihak lain untuk pelaksanaan MSP ini.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang diberikan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan MSP ini, Pihak pengungkap wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lain sebelum pengungkapan data dan/atau informasi tersebut.

Pasal 7

Pembatasan Kegiatan Personel

1. Para Pihak wajib memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan di bawah MSP ini wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan kedua negara dengan menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan MSP ini.
2. Apabila staf salah satu Pihak melanggar ayat 1 (satu) dari pasal ini, Pihak lain dapat mengakhiri MSP ini dan program-program di bawah ruang lingkup kerja sama.

Pasal 8

Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik dengan cara konsultasi dan/atau negosiasi antar Para Pihak.

Pasal 9

Perubahan

1. MSP ini dapat diubah secara tertulis melalui persetujuan bersama yang wajib disampaikan melalui jalur diplomatik. Perubahan tersebut wajib berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MSP ini.
2. Setiap perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan pada MSP ini sebelum tanggal perubahan tersebut.

Pasal 10

Penangguhan

Masing-masing Pihak memiliki hak atas dasar keamanan nasional, kepentingan nasional, dan ketertiban umum untuk menangguhkan sementara baik secara keseluruhan atau sebagian pelaksanaan atas MSP ini yang mulai berlaku segera setelah pemberitahuan telah diberikan kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik.

Pasal 11

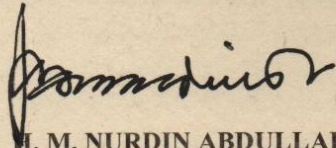
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

1. MSP ini wajib berlaku sejak tanggal ditandatangani. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis Para Pihak melalui jalur diplomatik.
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. Apabila MSP ini diakhiri, maka pengaturan atau kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung yang dibuat berdasarkan MSP ini wajib berlaku hingga penyelesaian kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.

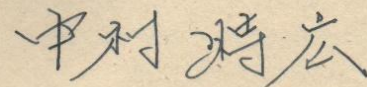
DIBUAT DAN DITANDATANGANI dalam tiga rangkap pada 16 Desember 2020 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dari MSP ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
REPUBLIK INDONESIA**



H. M. NURDIN ABDULLAH
GUBERNUR

**UNTUK PEMERINTAH
PREFEKTUR EHIME
JEPANG**



TOKIHIRO NAKAMURA
GUBERNUR